

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada temuan dan pembahasan sebelumnya mengenai studi bencana banjir di Gunungkidul, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua proses dan model komunikasi dalam kebutuhan bantuan bencana dan penyaluran bantuan bencana dalam masa tanggap darurat bencana banjir di Gunungkidul tahun 2017, yaitu proses dan model komunikasi berbasis birokrasi pemerintah dan berbasis relasi personal. Dalam kedua proses dan model tersebut ditemukan tokoh yang selalu muncul yaitu Kepala Dukuh dan Kepala Desa.

Proses berbasis birokrasi pemerintah dalam penyampaian kebutuhan bantuan dimulai dengan informasi dari masyarakat atau korban bencana, lalu dari masyarakat tersebut menyampaikan kebutuhannya kepada relawan, pemerintah desa atau dukuh. Dalam menyampaikan kebutuhannya korban menggunakan media telpon kepada pak dukuh untuk menyampaikan apa saja yang dibutuhkan. Lalu, pak dukuh menyampaikan kepada kepala desa yang kemudian meneruskan informasinya kepada relawan atau donatur. Dari penyampaian kebutuhan bantuan tersebut dalam kurun waktu satu minggu penuh pelayanan warga atau korban terpenuhi.

Sementara dalam penyaluran bantuan, penyebaran informasi dimulai di media dan memberikan informasi kepada para donatur dan pihak-pihak yang ingin membantu yang kemudian menyalurkan bantuannya melalui penyalur. Dalam hal ini penyaluran bantuan dilakukan melalui pemerintah daerah Gunungkidul, kemudian BPBD dan PMI, kemudian dari pihak tersebut ke pemerintah desa, pedukuhan, lalu ke masyarakat sebagai pihak yang menerima bantuan. Dalam proses birokrasi pemerintah berkesinambungan dengan model komunikasi Newcomb, di mana dalam proses tersebut ditemukan perubahan dalam bagian mana pun dari sistem koordinasi maka akan menimbulkan permasalahan dalam arus komunikasi dan informasi yang terjadi. Tetapi apabila informasi dapat simetris/seimbang maka kebutuhan bantuan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak.

Berlanjut kepada relasi personal. Dalam penyampaian kebutuhan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban dapat disampaikan langsung dari warga atau korban bencana banjir kepada relawan atau donatur yang ingin memberikan bantuannya kepada korban banjir. Bisa juga, warga menyampaikan kepada kepala dukuh, lalu kepala dukuh menyampaikan pesan kepada pemberi

bantuan. Proses penyampaian ini mempermudah para donatur dan relawan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan, sehingga penyampaian bantuan kebutuhan dapat tepat sasaran kepada warga terdampak.

Lalu dalam penyampaian bantuan, adanya informasi secara langsung dari warga atau korban bencana banjir mempermudah donatur untuk menyalurkan bantuan. Informasi tidak hanya dari media saja, melainkan dari orang-orang yang terlibat dalam bencana tersebut yang tahu kebenaran bencana sehingga lebih efektif dan tepat sasaran dalam pendistribusian bantuan. Tidak hanya itu, bantuan yang datang kepada korban secara langsung karena sebelumnya sudah kenal atau memang merasa empati dan simpatiknya. Penyaluran bantuan bencana secara personal harus didasari dengan adanya informasi kebutuhan yang langsung dari warga atau korban sendiri yang mempermudah para donatur untuk memberikan atau mendistribusikan bantuannya secara langsung kepada warga atau korban yang membutuhkan tersebut, yang tidak lepas dari koordinasi dengan perangkat desa setempat.

Oleh karena itu dalam proses komunikasi berbasis personal, model komunikasi yang serupa yaitu model komunikasi Westley MacLean, di mana dalam proses komunikasi personal tersebut menghasilkan umpan balik yang disebar dari personal (kepala desa/dukuh) dan media sehingga dapat mempengaruhi masyarakat atau donatur untuk membantu korban bencana. Selain itu dalam model dan proses komunikasi personal dapat meyakinkan/memaksimalkan kemampuan diri, baik relasi atau kemampuan lain. Sehingga dengan adanya tersebut mampu membangkitkan masyarakat dari keadaan darurat.

Perbandingan antara keduanya, yaitu proses dan model birokrasi berbasis birokrasi pemerintah dan berbasis relasi personal membuat masyarakat atau pemberi bantuan lebih memilih melalui relasi personal. Birokrasi pemerintah dinilai memiliki terlalu banyak tahapan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan relasi personal, baik dalam penyampaian informasi kebutuhan bantuan maupun dalam penyaluran kebutuhan bantuan. Selain itu, birokrasi pemerintah masih ditemui kesimpangsiuran dalam hal informasi terkini, karena pihak pemerintah tidak selalu menetap/berada dalam lokasi bencana. Informasi yang akurat biasanya datang dari personal/warga lalu disampaikan melalui media tertentu. Ketepatan dan kebaruan informasi terkini juga menjadi alasan mengapa relasi personal lebih sering ditempuh.

Selain itu, dari sisi para pemberi bantuan, jika melalui birokrasi pemerintah, kadang bantuan hanya sebatas sandang-pangan atau kebutuhan sehari-hari. Padahal dimungkinkan warga setempat membutuhkan hal-hal lain di samping itu. Misalnya saja seperti kebutuhan alat tulis bagi masyarakat yang masih bersekolah, kebutuhan edukasi tentang pascabencana ataupun *trauma-healing*. Kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya lebih sering dipenuhi melalui relasi personal

yang dimiliki oleh warga setempat. Sehingga, pemenuhan kebutuhan di luar kebutuhan sehari-hari (sandang/pangan) kebanyakan lahir dari informasi personal karena yang bersangkutan merupakan warga setempat yang lebih tahu kondisi terkini dan apa yang paling dibutuhkan pada saat itu. Sementara jika lewat pemerintah, dimungkinkan akan melewati serangkaian perizinan yang rumit dan sistematis.

Dalam temuan peneliti telah dijelaskan bahwa peran Kepala Dukuh dan Kepala Desa menjadi *spokesperson* yang lebih penting dan lebih besar dibanding birokrasi pemerintah. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan dalam birokrasi pemerintah, di antaranya yaitu adanya ketimpangan akses komunikasi dan informasi. Peran Kepala Dukuh dan Kepala Desa kemudian menjadi lebih penting dan lebih besar, mengingat Kepala Dukuh dan Kepala Desa akan berusaha memenuhi ketimpangan akses komunikasi dan informasi tersebut. Kepala Desa dan Kepala Dukuh akan menjadi *spokesperson* yang tidak tergantikan karena perannya dalam menyampaikan informasi terkini, akurat dan lengkap dari situasi yang terjadi di lapangan.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga masih banyak kekurangan didalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Masih banyak *stakeholders* yang belum diwawancarai, seperti BPBD, Kepolisian dan TNI, dan dinas-dinas yang terkait dengan kebencanaan.

C. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah kajian mengenai penggunaan media, baik media massa maupun media sosial, dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

Adapun saran yang peneliti lakukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam penanggulangan, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana banjir Gunungkidul, yaitu:

1. Saran kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu agar dapat melakukan sosialisasi mengenai *trauma-healing*, edukasi tanggap bencana, dan pendidikan darurat bagi siswa-siswi yang sekolahnya terkena dampak bencana banjir.
2. Melakukan program mitigasi bencana di seluruh dukuh, agar warga dapat memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi dalam menanggulangi bencana di daerahnya dan dapat bekerjasama dengan baik bersama pemerintah.
3. Perkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan dalam kegiatan penanggulangan bencana.